

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Akhmadi

ABSTRACT

With issues that have been formulated, then start the process of collecting, processing and analysis of data, aimed at the achievement of the goal of this research is (1) to analyze the condition of accountability, transparency and effectiveness of budget management on local work units at Batanghari Regency Government before and after the application of performance-based budgeting. (2) to analyze the influence of accountability and transparency on the effectiveness of budget management on local work units at Batanghari Regency. (3) to know the differences between the conditions and the influence of accountability, and transparency of budget management effectiveness both before and after the application of performance-based budgeting. Analytical tools used to achieve the first goal is the approach advocated by Husein Umar (2001), using the average value of the index is to determine the value of the class and to interpret fractions used numerical scale linearly. To achieve the second goals in this research is the influence of accountability and transparency as the independent variables on the effectiveness of budget management on local work units at Batanghari Regency Government, data analysis used is multiple regression (Danang Sunyoto 2012), this method uses computer through SPSS 17 for windows. The results of this research can be concluded that the conditions of accountability and transparency as devenden variables and then the effectiveness of budget management as dependent variable, better condition after the application of performance-based budgeting, as well as the influence of independent variables on the variable devenden, more powerful and positive after application of performance-based budgeting. And then through different test turned out good condition accountability, transparency and effectiveness of budget management on local work units at Batanghari Regency Government, has more value after application of performance-based budgeting compared with value before application of performance-based budgeting.

Keyword ; Effectiveness, Accountability, Transparacy, and Budgetting

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dengan meningkatkan alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke daerah.

Sebagai konsekuensi dari penyaluran dana yang semakin besar, Pemerintah Daerah dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan daerah secara profesional. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melakukan reformasi dibidang keuangan negara. Reformasi dibidang keuangan tersebut mencakup semua aspek manajemen keuangan, termasuk perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut mensyaratkan manajemen keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Reformasi di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat fundamental desentralisasi di Indonesia. Hal ini lah yang mendorong lahirnya Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penjelmaan dari Undang-Undang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Misi utama dari regulasi ini adalah Desentralisasi, yang melahirkan pergeseran pradikma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam aspek pengelolaan kekuasaan dan keuangan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah lebih mendengarkan pada apirasi masyarakat dalam proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Misi lain yang ingin dicapai kedua Undang-Undang tersebut adalah peningkatan **transparansi** dan **akuntabilitas** Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era globalisasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeleloaan keuangan daerah semakin meningkat dan sudah tidak bisa ditawar lagi, dan bukan hanya untuk kebutuhan manajemen suatu kelompok, tetapi juga untuk kebutuhan *pertanggungjawaban (accountability)* kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip pengelolaan anggaran, maka pemerintah akan melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, anggaran juga harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan tugas, rencana dan biaya yang dikeluarkan sehingga terciptanya efektivitas pelaksanaan anggaran yang diinginkan. Begitu pentingnya Transparansi dan akuntabilitas serta efektifitas pelaksanaan anggaran, sehingga ketiga norma ini

menjadi prinsip untuk ditegakkkan mengingat adanya keterkaitan satu dengan lainnya.

Dengan mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. bahwa kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah ada pada masing-masing SKPD. Oleh karena itu setiap SKPD harus mampu memajemen pengelolaan keuangan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan TUPOKSI yang dimiliki dengan orientasi seperti apa yang telah diuraikan diatas yaitu pada alokasi pembiayaan, dengan tuntutan dan tuntunan “berbasis kinerja”.

Untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja, maka dalam pengelolaannya haruslah mengedepankan unsur transparan dan akuntabel, sehingga pelaksanaan anggaran dimaksud dapat di kelola seefektif mungkin.

Pentingnya unsur transparan dalam pengelolaan anggaran pada setiap SKPD, dikarenakan oleh tuntutan dan kandungan makna transparan itu sendiri, yang dapat menjadi pendorong semangat kerjasama, membuka benteng birokrasi, terciptanya hubungan yang harmonis dalam lingkup organisasi serta adanya saling percaya dan pada akhirnya akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Usur akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga merupakan ukuran dari rasa tanggungjawab dan saling memberikan informasi baik tentang **waktu**, **besaran** serta **sasaran** yang ingin dicapai dari aliran dana untuk membiayai suatu kegiatan. Dan jika hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan baik, maka dampak dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran akan mendorong terciptanya efektivitas dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri.

Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan tahap dimana dilaksanakannya rencana kegiatan keuangan yang berisi pekerjaan belanja yang diusulkan dalam satu periode dari sumber pendapatan yang diusulkan membiayai belanja dalam satuan moneter tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan (Mardiasmo, 2002). Efektivitas dapat dibedakan atas tiga yaitu efektivitas **waktu**, efektivitas **capaian** dan efektivitas **anggaran**.

Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka (Mardiasmo, 2002).

Selain itu sering terjadi keterlambatan dalam pengajuan dan pengesahan APBD baik APBD tahun berjalan maupun perubahan. Berdasarkan premis tersebut dapat penulis simpulkan hipotesis sementara bahwa belum terdapat efektivitas waktu, capaian dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah yaitu:

1. Untuk menganalisis kondisi akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebelum dan sesudah penerapan ABK
2. Untuk menganalisis pengaruh kondisi akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebelum dan sesudah penerapan ABK
3. Untuk mengetahui perbedaan kondisi dan pengaruh akuntabilitas dan transparansi dengan efektivitas pengelolaan anggaran sebelum dan sesudah penerapan ABK.

B. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survey. Metode survey ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) berstruktur dan terpolanya sesuai dengan kebutuhan. Metode penelitian mengacu pada topik dan judul penelitian. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989). Metode survey tersebut digunakan terbatas pada survey sampel dengan mengumpulkan informasi dari sebagian populasi, dengan harapan akan didapat data yang cukup representatif.

Untuk menjawab permasalahan dan/atau tujuan ke dua dalam penelitian ini yaitu pengaruh akuntabilitas dan transparansi sebagai Independen variabel terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari, analisis data yang digunakan terdiri dari analisis Regresi Berganda (Regresi Analysis) (Danang Sunyoto 2012), metode ini menggunakan bantuan komputer melalui program *SPSS for windows*.

Dalam menganalisis data digunakan statistik inferens (statistik induktif), untuk mengetahui tingkat signifikansi korelasi antara variabel indeviden (X) dan Variabel dependen (Y). Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan diperlukan juga dilakukan analisa dan oleh karena hipotesis penelitian yang dirumuskan menunjukkan pada penelitian korelatif, maka teknik yang digunakan menganalisis tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah model statistika analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda (Multiple regression Analysis).

Esensi dari teknik analisis ini adalah mencari kolerasi antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen dan taraf signifikasinya. Adapun rumus regresi sesuai model dalam penelitian ini adalah Model Regresi Linier Berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih Variabel independen terhadap variabel dependen (Santoso, 2000), yaitu Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas pengelolaan anggaran dengan formulai berikut;

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

\hat{Y} = Efektifitas

β_0 = Konstanta atau parameter

$\beta_1 \beta_2$ = Koeffisiean Regresi

X_1 = Akunbilitas (A)

X_2 = Transparansi (T)

e = Standar Error

Untuk menjawab permasalahan dan/atau tujuan ke tiga dalam penelitian ini yaitu perbandingan kondisi akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan perbandingan pengaruh Variabel Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) sebagai variabel independen, terhadap Efektivitas (Y) sebagai variabel dependen dalam pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dilakukan dengan alat analisa **Paired-Samples t Test (Uji t untuk dua sampel berpasangan)**.

Paired-Sampel T Test digunakan untuk uji beda pada yang berpasangan. Pengujian ini sering dilakukan pada penelitian event study atau eksperimen dengan perlakuan tertentu. (Tony Wijaya : 2012)

Pengujian perbedaan dua rata-rata populasi dengan uji t, untuk menguji perbandingan satu perlakuan. Peneliti melakukan dua kali yaitu Akutabilitas, Transparansi, Efektivitas sebelum Pemendagri 13/2006 dan Akuntabilitas Transparansi dan Efektivitas sesudah Pemendagri 13/2006, dengan mengunnakan formulasi sebagai berikut;

$$t = \frac{\bar{D}}{SD} \text{ dimana ;}$$

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n} = X_1 - X_2 \text{ dan}$$

$$SD = \frac{SD}{\sqrt{n}} \quad SD = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

D = adalah pasangan skor $X_1 - X_2$

\bar{D}
 D = rata – rata D

\bar{SD} = simpangan baku rata-rata D (C.Trihenndradi : 2013)

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-1$ atau $136-2 = 134$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,977 (Lihat pada lampiran) atau dapat dicari di Ms Excel dengan cara pada cell kosong ketik = tinv (0.05,134) lalu enter.

C. PEMBAHASAN

Kondisi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Sebelum ABK.

Variabel akuntabilitas terdiri dari indikator 1) akuntabilitas kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD; 2) akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 3) akuntabilitas proses mengalokasikan dana yang ada dalam APBD; 4) akuntabilitas hukum dan peradilan dalam penggunaan dana publik. Variabel akuntabilitas tersebar pada 10 item pernyataan kuesioner. Tabel distribusi akuntabilitas sebelum penerapan ABK dapat dilihat pada tabel 5.1. rata-rata indeks akuntabilitas dihalaman berikut.

Dari Tabel 5.1 dimaksud, dapat dilihat tingkat capaian responden terendah adalah 3,80 % berada pada item nomor 1 dengan pernyataan bahwa Pelaksanaa anggaran telah melibatkan seruruh jajaran dibawah kepemimpinan yang sensitive dan responsip dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat capaian tertinggi adalah 4,21 % berada pada item nomor 2 dengan pernyataan bahwa Secara rutin memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada DPRD .

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran pada SKPD di dalam lingkup Pemerintah Daerah Batang Hari dari 136 responden yang diteliti, kondisi akuntabilitas pelaksanaan anggaran memiliki rata-rata indeks sebesar 3,17 %. Dengan demikian kondisi akuntabilitas yang ada *dikategorikan baik*.

Kondisi Transparansi Pengelolaan Anggaran Sebelum ABK.

Variabel transparansi terdiri dari indikator 1) terdapat kejelasan tugas dan wewenang; 2) laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah 3) kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik; 4) ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban; 5) kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat; 6) adanya sistim penyampaian informasi anggaran kepada publik; 7) laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa independen. Variabel transparansi tersebar pada 10 item pernyataan kuesioner. Rata-rata Indeks transparansi pengelolaan anggaran seperti pada tabel 5.2. di halaman berikut.

Dari Tabel 5.2 dimaksud, dapat dilihat tingkat capaian responden terendah adalah 2,93 % berada pada item nomor 4 dengan pertanyaan bahwa Kode akun (*chart of account*) pada laporan keuangan pemerintah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) . Tingkat capaian tertinggi adalah 4,65 % berada pada item nomor 7 dengan pernyataan bahwa Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik.

Kondisi Efektivitas Pengelolaan Anggaran sebelum ABK.

Variabel efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari indikator 1) sistem akuntansi lengkap dan memadai; 2) kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan; 3) rencana kegiatan anggaran dilaksanakan pada waktunya; 4) perubahan anggaran sesuai dengan prinsip anggaran; 5) sistem perencanaan dan pengendalian yang handal; 6) pelaksanaan anggaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Variabel efektivitas pelaksanaan anggaran tersebar pada 10 item pernyataan kuesioner. Rata-rata indeks efektivitas pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel 5.3 halaman berikut;

Dari Tabel 5.3 dimaksud, dapat dilihat tingkat capaian responden terendah adalah 3,23 % berada pada item nomor 9 dengan pertanyaan Pemegang kas pada masing-masing unit kerja yang bersangkutan dalam menyampaikan SPJ telah mentaati ketentuan yang berlaku. Tingkat capaian tertinggi adalah 4 % berada pada item nomor 8 dengan pernyataan bahwa Rancangan Anggaran Kas SKPD disusun berdasarkan rancangan DPA-SKPD.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran pada SKPD di dalam lingkup Pemerintah Daerah Batang Hari dari 136 responden yang diteliti, kondisi transparansi pelaksanaan anggaran memiliki rata-rata indeks sebesar 3,63 %. Dengan demikian kondisi akuntabilitas yang ada **dikategorikan baik.**

Kondisi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran setelah ABK.

Variabel akuntabilitas terdiri dari indikator 1) akuntabilitas kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD; 2) akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 3) akuntabilitas proses mengalokasikan dana yang ada dalam APBD; 4) akuntabilitas hukum dan peradilan dalam penggunaan dana publik. Variabel akuntabilitas tersebar pada 10 item pernyataan kuesioner.

tingkat capaian responden terendah adalah 4,07% berada pada item nomor 6 dengan pernyataan bahwa Pelaksanaan program-program anggaran (APBD) benar-benar dirasakan. Tingkat capaian tertinggi adalah 4,92% berada pada item nomor 5 dengan pernyataan bahwa Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum menunjukkan bahwa dari seluruh SKPD di di Kabupaten Batang Hari atau 136 responden yang diteliti, tingkat akuntabilitas pelaksanaan anggaran memiliki rata-rata 4,44 %. Dengan demikian akuntabilitas yang ada dikategorikan **sangat baik.**

Kondisi Transparansi Pengelolaan Anggaran setelah ABK.

Variabel transparansi terdiri dari indikator 1) terdapat kejelasan tugas dan wewenang; 2) laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah 3) kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik; 4) ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban; 5) kemampuan transparansi anggaran

dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat; 6) adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik; 7) laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa independen. Variabel transparansi tersebar pada 10 item pernyataan kuesioner.

dilihat tingkat capaian responden terendah adalah 3,79 % berada pada item nomor 5 dengan pernyataan bahwa selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tingkat capaian tertinggi adalah 4,60 % berada pada item nomor 3 dengan pernyataan bahwa adanya laporan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum menunjukkan bahwa dari seluruh SKPD di Kabupaten Batang Hari atau 136 responden yang diteliti, tingkat transparansi pelaksanaan anggaran memiliki rata-rata 4,19 %. Dengan demikian akuntabilitas yang ada dikategorikan **sangat baik**.

Kondisi Efektivitas Pengelolaan Anggaran setelah ABK.

Variabel efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari indikator 1) sistem akuntansi lengkap dan memadai; 2) kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan biaya yang dikeluarkan; 3) rencana kegiatan anggaran dilaksanakan pada waktunya; 4) perubahan anggaran sesuai dengan prinsip anggaran; 5) sistem perencanaan dan pengendalian yang handal; 6) pelaksanaan anggaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Variabel efektivitas pelaksanaan anggaran tersebar pada 10 item pernyataan kuesioner

distribusi efektivitas pelaksanaan anggaran diatas, dapat dilihat tingkat capaian responden terendah adalah 2,37 % berada pada item nomor 6 dengan pertanyaan bahwa Adanya perencanaan pemerintah yang memadai. Tingkat capaian tertinggi adalah 4,63 % berada pada item nomor 8 dengan pernyataan bahwa Rancangan Anggaran Kas SKPD disusun berdasarkan rancangan DPA-SKPD.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum menunjukkan bahwa dari seluruh SKPD di Kabupaten Batang Hari atau 136 responden yang diteliti, tingkat efektivitas pengelolaan anggaran memiliki rata-rata indeks sebesar 4,10 %. Dengan demikian Efektivitas pengelolaan anggaran setelah penerapan ABK dikategorikan **sangat baik**.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

Sesuai dengan tujuan kedua dalam penelitian ini, bahwa penulis akan melihat pengaruh dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan mengingat ketiga variabel yang diteliti merupakan bagian dari norma dan prinsip dalam pengelolaan anggaran, serta terdapat keterkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu hubungan antara dua variabel Independen yang terdiri dari Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) dengan variabel devenden yaitu Efektivitas (Y) akan dilakukan analisa baik sebelum maupun sesudah penerapan Permendagri 13/2006 dengan tuntutan dan tuntunan *Anggaran Berbasis Kinerja(ABK)* seperti uraian berikut ini.

Gambaran pengelolaan anggaran sebelum diterapkannya ABK, masih terpusat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, sehingga adanya keterbatasan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk ikut serta dalam proses pengelolaan keuangan termasuk proses pengelolaan anggaran pada masing-masing SKPD. Untuk mengetahui pengaruh independen variabel terhadap devenden variabel, maka berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dengan teknik regresi berganda.

Kegiatan perhitungan menggunakan SPSS *for windows*. seperti pada uraian berikut ini;

Analisa Regresi sebelum ABK

Teknik analisis berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Dengan bantuan program SPSS *for Windows*, koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran.

dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 25,606 - 0,001 X_1 + 0,352 X_2$$

Dimana:

\hat{Y} = Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

$- 0,001 X_1$ = Koefisien Regresi Akuntabilitas

+ 0,352 X₂ = Koefisien Regresi Transparansi

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 25,606 yang berarti bahwa tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pada SKPD, nilai variabel efektivitas pelaksanaan anggaran berada pada 25,606 satuan. Nilai koefisien dari variabel X₁ adalah sebesar - 0,001 ini berarti bahwa jika akuntabilitas bertambah satu satuan, maka efektivitas pelaksanaan anggaran akan berubah sebesar - 0,001 satuan. Nilai koefisien dari variabel X₂ adalah sebesar 0,352 ini berarti bahwa meningkatnya akuntabilitas satu satuan, maka akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran sebesar 0,352 satuan.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari Sesudah Penerapan ABK.

Sama halnya dengan analisa penerapan pengelolaan anggaran berdasarkan sebelum ABK, maka untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel devenden dilakukan dengan regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS *for Windows*.

Analisa Regresi sesudah ABK

Teknik analisis berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Dengan bantuan program *SPSS for Windoes*, koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran.

dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 5.171 + 0,352 X_1 + 0,558 X_2$$

Dimana:

\hat{Y} = Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

5.171 = Nilai Konstanta/Parameter

0,352 X₁ = Koefisien Regresi Akuntabilitas

0,558 X₂ = Koefisien Regresi Transparansi

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 5.171 yang berarti bahwa tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Batang Hari, maka nilai variabel efektivitas pelaksanaan anggaran berada pada 5.171 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_1 adalah sebesar 0,352 ini berarti bahwa meningkatnya akuntabilitas satu satuan, maka efektivitas pelaksanaan anggaran meningkat sebesar 0.352 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_2 adalah sebesar 0,558 ini berarti bahwa meningkatnya akuntabilitas satu satuan, maka akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran sebesar 0,558 satuan.

D. KESIMPULAN dan SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dan didukung dengan teori serta pembahasan pada bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, dan saran berkaitan dengan penelitian dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu seperti berikut;

1. Akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Batang Hari lebih baik setelah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Sebelum penerapan pengelolaan ABK secara parsial pengaruh akuntabilitas adalah negatif dan transparansi adalah positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, maka hipotesis pertama ditolak dan hipotesis ke dua diterima. Sedangkan setelah penerapan pengelolaan ABK pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan ABK adalah positif signifikan, maka hipotesis pertama dan kedua diterima.
3. Terdapat perbedaan nilai rata-rata variabel akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari, antara sebelum penerapan ABK dengan sesudah penerapan ABK.

SARAN

Bertolak dari kesimpulan penelitian maka penulis mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari perlu lebih memperhatikan aparatur pengelola anggaran, mengingat sebahagian besar aparatur pengelola anggaran adalah aparatur yang berperan sebagai pelaku pengelola anggaran baik sebelum maupun sesudah penerapan Permendagri 13/2006, sehingga paradigma untuk meningkatkan aspek akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran masih sangat perlu untuk diperhatikan.
2. Pemerintah Daerah perlu memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan terutama unsur-unsur masyarakat mulai dari perencanaan samapai pada pengalokasian, sehingga mempermudah pencapaian amanah akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan anggara Pemerintah Daerah.
3. Penelitian-penelitian berikutnya masih dibutuhkan pada bidang yang sama tentang perkembangan tingkat akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran dengan target capaian yang jelas karena hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih mengandung ketidak konsistenan terhadap hasil pihak-pihak terkait dalam pengelolaan anggaran, serta diharapkan bagi para peneliti lain agar dapat mengumpulkan data primer tidak hanya dari penyebaran kuisioner namun harus ditunjang dengan wawancara maupun observasi langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Agung Sugih Arti, 2007, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok, www.google.com pada tanggal 16 Agustus 2008
- Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

- BPK RI. 2007. "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Untuk Tahun Anggaran 2006". Diakses melalui www.google.com pada tanggal 2 Juni 2008
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Doni Setiawan. 2006. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Skripsi*. STAN
- Simanungkalit, Ester, 2011, Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi dengan Efektivitas pada pelayanan Publik (Studi Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru) www.google.com pada tanggal 6 April 2011
- Fauzi Aziz. "Sistem Pengendalian Internal". Diakses melalui www.google.com pada tanggal 3 Juli 2008
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- LAN. 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Diakses melalui www.google.com pada tanggal 19 Juli 2008
- Nasrul Azwar. 2007. "Mantagisme". Diakses melalui www.google.com pada tanggal 2 Juni 2008
- Rima Rosseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. UII
- Widia Eka Putri. 2007. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik. *Skripsi*. UNP
- Yana Syafrie. 2008. "Otonomi Daerah dan Anggaran Berbasis Publik". Diakses melalui www.google.com pada tanggal 2 Juni 2008
- Nurul Zuriyah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

3 Undang-Undang Bidang Keuangan. 2004. Jakarta: CV Eko Jaya